

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) mengetahui dan menjelaskan dinamika agenda setting dalam relokasi industri pengecoran dan peleburan logam di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal; 2) mengetahui dan menjelaskan siapa saja aktor dominan dalam dinamika agenda setting dalam relokasi industri pengecoran dan peleburan logam di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data di peroleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis menggunakan metode analisis model interaktif Miles dan Huberman. Maka untuk menjamin validitas data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan relokasi industri logam yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan banyak spekulasi yang terjadi pada saat relokasi. Relokasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal nyatanya tidak berjalan dengan mudah. Masalah yang timbul ketika limbah logam yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun) menjadi pencemaran selama bertahun-tahun di daerah sekitar lingkungan Industri pengecoran dan peleburan logam yang terletak di tengah permukiman padat penduduk Dukuh Klambon. Kebiasaan pemilik industri yang memiliki kepercayaan jika di pindah akan mengurangi pendapatan mereka juga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat sangat sulit untuk menyesuaikan dirinya di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Kebasen. Adanya relokasi industri logam di inisiasi oleh di Pemerintah Kabupaten Tegal diantaranya SKPD sebagai pelaksana teknis kebijakan seperti BLH, DISPRINDAG dan BAPPEDA. BLH melakukan relokasi dengan berdasarkan lahan yang sudah beramdal untuk dijadikan penempatan ex pesarean di PIK Kebasen. Peran BAPPEDA dan DISPRINDAG hanya pada tataran pembangunan tata ruang di PIK Kebasen. Peran DPRD Kabupaten Tegal sebagai fungsi legislasi tidak berjalan pada relokasi industri logam di Pesarean, pengawasan terhadap adanya relokasi pun DPRD hanya menyerahkan kewenangan ini kepada BLH sebagai pelaksana teknis. Dalam relokasi industri logam juga membawa berbagai kepentingan, dari kepentingan masyarakat bahkan kepentingan kelompok. Kepentingan ini terlihat pada Wakil Bupati Hamam sebagai inisiator untuk merelokasi di lahan tanah yang dimiliki Bapak Hamam. Lahan relokasi yang di kaplingkan kepada pemilik industri dengan menggandeng Bank BPD Jateng sebagai solusi pembayaran bagi pembeli tanah kapling yang berada di PIK Kebasen.

Kata Kunci: Agenda Setting, Kewenangan BLH, Relokasi Industri

SUMMARY

This research was conducted in order to: 1) understand and explain the dynamics of agenda setting in the relocation of industrial casting and smelting in the village Pesarean, District Adiwerna, Tegal; 2) identify and explain Who are the dominant actors in the dynamics of agenda setting in the relocation of industrial casting and smelting in the village Pesarean, District Adiwerna, Tegal.

The method used in this research is a qualitative method with case study approach. Data obtained from the results of observation, interviews, and documentation. Then the data analyzed by using analytical methods Miles and Huberman interactive model, and to ensure the validity of the research data this research use triangular techniques.

These results indicate the metal industry relocation policy conducted by the Government gives rise to much speculation that occurred at the time of relocation. Relocation of the Government of Tegal fact not walk easily. Problems arise when the metal-containing waste B3 (hazardous and toxic materials) into pollution for many years in the area surrounding neighborhood foundry and smelting Metal Industries located in the middle of densely populated settlements Klambon Hamlet. Habit industrial owner that has the trust if moved would reduce their income is also one factor that makes people very difficult to adjust themselves in *Perkampungan Industri Kecil* (PIK) Kebasen. The relocation in the metal industry are driven by Tegal Regency SKPD as technical implementing policies such as BLH, DISPRINDAG and BAPPEDA. BLH held the relocation with by land already using Amdal to be used in the placement of ex Pesarean PIK Kebasen. BAPPEDA and DISPRINDAG role only at the level of spatial development in PIK Kebasen. Tegal Regency role as legislative function is not running on the relocation of the metal industry in Pesarean, supervision of the relocation of Parliament was just handed this authority to the BLH as technical implementation. In the relocation of industrial metals also carries a wide range of interests, from the public interest and the interests of the group. This interest is shown in the Vice Regent Hamam as an initiator to relocate on land owned land Mr. Hamam. The land relocation in kaplingkan to the owner of the industry by cooperating with BPD Central Java as payment solutions for buyers of land plots that are in PIK Kebasen.

Keywords: Agenda Setting, BLH Authority , Relocation Industry